



RENJA

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan A. Yani No. 01 Telp. (0526) 2028408 Paringin
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71662

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Sekretariat Daerah sekarang ini dalam menjalankan aktifitasnya menghadapi permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Semakin besar kewenangan Sekretariat Daerah tersebut, semakin beragam pula kondisi lingkungan yang perlu dicermati secara seksama untuk mengeliminir kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itulah maka diperlukan suatu pola manajemen yang baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dari siklus ini bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuannya.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam pelaksanaan anggaran di Sekretariat Daerah agar lebih efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Paringin, Januari 2024

Sekretaris Daerah,



Drs. H. Sutilno, AP., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19760417 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	55
3.3 Program dan Kegiatan	58
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB V. PENUTUP	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2024.

Dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021- 2026 Pemerintah Kabupaten Balangan.

Semua Dokumen Perencanaan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra-SKPD dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun mengacu kepada Renja pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum (RKUA) APBD didasarkan pada RKPD yang telah disusun sebelumnya, yang kemudian RKUA inilah yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

- Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
 24. Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi pemerintah Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Tahun 2024 ini diantaranya adalah:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan antar Bagian, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
3. Tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, proses pencapaian visi dan misi nasional dilakukan melalui pentahapan 5 (lima) tahunan. Dalam proses tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021 ini adalah tahapan Pertama dengan penekanan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan daya saing perekonomian.

Pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar bangsa.

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun dengan memperkuat kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Namun demikian, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian.

Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar bangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi

saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
2. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
3. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia.

Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata.

Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah tantangan.

Masalah kebudayaan dalam arti yang seluasnya dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi

semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranatapradata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, seluruh bangsa Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pengurangan kesenjangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 - 2026 yaitu:

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya mengacu pada pencapaian misi ke-4 Kabupaten Balangan yaitu:

“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara”

Perwujudan pelaksanaan misi ke-4 tersebut menjadi Visi dari Sekretariat Daerah yang juga merupakan visi dari RPJMD 2021-2026 yaitu:

**”Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan
Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”**

Pencapaian Visi Sekretariat Daerah tersebut dengan melaksanakan misi dan tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, yaitu **terwujudnya tata kelola perumusan kebijakan dan koordinasi pemerintahan yang efektif.**

Indikator Tujuan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP;
2. Indeks Pelayanan Publik;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Nilai EKPPD.

Pencapaian tujuan Sekretariat Daerah tersebut tidak lepas dari pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat. Adapun Sasaran tersebut adalah **meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi.**

Adapun rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran beserta target disampaikan pada tabel 3.2

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2021-2026					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Kabupaten			BB =72.4	BB =74.4	BB =76.4	BB =78.2
			Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi			100%	100%	100%	100%
			Nilai Budaya Kerja Kabupaten			79,51	79,51	79,51	79,51
			Nilai IKM kabupaten			83.70	84.00	84.50	85.00
			Nilai SAKIP SETDA			72,40	72,40	72,40	72,40

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah merupakan program yang disusun berdasarkan kebutuhan akan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Balangan. Sekretariat dalam tugas dan fungsinya sebagai SKPD yang menunjang keberhasilan pencapaian misi ke-4 Kepala Daerah yang tertuang dalam Kebijakan umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Program pembangunan daerah adalah program kepala daerah terpilih berupa kumpulan program dan kegiatan prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Sekretariat sebagai salah satu SKPD yang mendukung pencapaian misi ke-4 Kepala daerah kabupaten Balangan dapat berfungsi menjadi fasilitator dalam rangka peningkatan pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), penyelenggaraan pemerintahan, serta pembangunan menuju kepada *good governance* dan *clear government*. Untuk itu, diperlukan regulasi, sistem, dan budaya kerja bagi aparatur pemerintah daerah yang mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan bekerja, kesesuaian pekerjaan dengan tingkat kompetensi, kejelasan jenjang karir serta sistem *reward* dan *punishment* yang tepat dan memadai.

Program dan kegiatan prioritas berdasarkan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Program Kegiatan Prioritas Pendukung sasaran RPJMD
Kabupaten Balangan Tahun 2024

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja (Outcome)	Target 2024	Sasaran SKPD	IKU SKPD	Target 2024	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Unit Penanggungjawab	
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Kabupaten	BB=74,4	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Kabupaten	BB=74,4	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Bagian Organisasi	
							Kegiatan: Penataan Organisasi		
							Sub Kegiatan: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
		Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi	100%		Persentase SKPD dengan capaian IKK tinggi	100%	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
		Nilai Budaya Kerja Kabupaten	79,51		Nilai Budaya Kerja Kabupaten	79,51			
		Nilai IKM kabupaten	84.00		Nilai IKM kabupaten	84.00	Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Bagian Pemerintahan
		Nilai SAKIP SETDA	72,40		Nilai SAKIP SETDA	72,40	Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan		
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja 2024 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2022. Evaluasi Renja 2022 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Sekretaris Daerah, realisasi anggaran pada tahun anggaran 2022 disampaikan pada tabel 2.1

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 8 (delapan) kegiatan yang Realisasinya tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan dan sebanyak 4 (empat puluh satu) kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan namun terdapat 5 (lima) kegiatan diantaranya realisasi capaian melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Sekretariat Daerah pada periode 2022-2026 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	3	4	5	7	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16
			K	K	K	K	K	K	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,00	6 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00		0,00	
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi		Sangat Rendah	

4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ktentuan Yang Berlaku	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang / Bulan	89 Orang / Bulan	89 Orang / Bulan	100,00	89 Orang / Bulan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						100,00		0,00	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	0 %	100 %	100 %	100,00	100 %	0,00	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						100,00		0,00	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	1 Paket	50,00	1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

		Disediakan							
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	467 Laporan	467 Laporan	100,00	467 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						91,67		0,00	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	16,67	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						100,00		0,00	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	16,67	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	50 Unit	50 Unit	100,00	50 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20 Unit	20 Unit	100,00	20 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						100,00		0,00	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	1 Orang / Bulan	50,00	1 Orang / Bulan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	2 Orang / Bulan	100,00	2 Orang / Bulan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						83,33		0,00	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Nilai Komposit Kelembagaan	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	100,00	80 Nilai	100,00	
		Nilai IKM Bagian dan UPP yang Bernilai Baik	0 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	100,00	80 Nilai	inf	
		Nilai RB Area Akuntabilitas	0 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	100,00	80 Nilai	inf	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen	100,00	65 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

		dan Tata Laksana							
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	0,00	
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokol Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00	5 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100,00	0,00	
				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
				Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)			100,00	57,58	
				Predikat Kinerja (Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	100 %	100 %	75 %	75,00	75 %	75,00	
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100 %	100 %	75 %	75,00	75,00 %	75,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)					100,00		0,00	
	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)					Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)					100,00		0,00	
	Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)					Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	100,00	500 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	100,00	10 Kasus	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen	100,00	500 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						100,00		0,00	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	60 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	16,67	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	10 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						100,00		0,00	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)						Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)						100,00		79,17	
Predikat Kinerja (Kegiatan)						Sangat Tinggi		Tinggi	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	100 %	100 %	75 %	75,00	75 %	75,00	
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100 %	100 %	75 %	75,00	75,00 %	75,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)						100,00		0,00	

			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Bahan Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	100,00	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat Daerah s/d tahun 2022 yang disampaikan di atas dapat dijelaskan bahwa 8 (delapan) kegiatan tidak memenuhi target kinerja dan 5 (lima) kegiatan dengan realisasi capaiannya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Sebanyak 8 (Delapan) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran. Sejumlah 8 (delapan) kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang tidak menunjang secara langsung pencapaian IKU SKPD sehingga tidak tercapainya target kinerjanya tidak mengganggu capaian kinerja utama Sekretariat Daerah.

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Sebanyak 41 (empat puluh satu) kegiatan dalam pelaksanaan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun kegiatan dengan realisasi kinerja 100% adalah dapat dilihat pada tabel 2.2 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah.

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Sebanyak 5 (lima) kegiatan yang realisasi capaiannya melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, yaitu:

- 1) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 2) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan.
- 3) Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- 4) Kegiatan kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah.
- 5) Kegiatan penanganan kasus pengaduan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Dari 5 (lima) kegiatan yang capainnya melebihi target di tahun 2020 merupakan kegiatan rutin yang tidak terkait langsung dengan

capaian IKU Sekretariat Daerah. Pencapaian target yang melebihi dari rencana target ini menyebabkan capaian target Renstra sampai dengan tahun 2022 meningkat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah tercapainya target kinerja lebih cepat dari perencanaan pencapaian target kinerja 5 tahunan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- **Penyebab tidak terpenuhinya target adalah sebagai berikut:**
 - Tidak meratanya kemampuan PNS dalam perencanaan di dalam Setda itu sendiri;
 - Rendahnya kemampuan PNS dalam menyusun indikator kinerja yg tepat syarat;
 - Kualitas SPIP di SKPD masih rendah;
 - Pencapaian kinerja masih diukur melalui capaian serapan anggaran bukan hasil/ output dari penggunaan anggaran tersebut;
 - Kebiasaan menunda pekerjaan oleh pelaksanaan program/ kegiatan yang akhirnya menyebabkan pelaksanaan program/ kegiatan terhambat.

- **Penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:**
 - Penyusunan perencanaan sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi;
 - Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dengan fokus pada pencapaian target kinerja nyata;
 - Dilaksanakannya rencana aksi dan angkas sesuai jadwal yang direncanakan;

- **Penyebab terpenuhinya target kinerja melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:**
 - Ketidakmampuan dalam menyusun target kinerja di awal Renstra;

- Tidak tersedianya data awal saat menyusun perencanaan target kinerja sehingga menyusun target kinerja;
- Adanya perubahan yang meningkat secara signifikan dari target awal Renja.

Program/ kegiatan yang target kinerjanya tidak tercapai atau melebihi target kinerja program dan kegiatannya tidak menimbulkan implikasi terhadap target capaian program Renstra, dikarenakan program/ kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan rutin yang tidak menunjang secara langsung pencapaian IKU SKPD sehingga tidak mengganggu capaian kinerja utama Sekretariat Daerah.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyusun target kinerja harus sudah di rumuskan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* lingkup Sekretariat Daerah;
2. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja;
3. Perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sesuai dengan isi Peraturan Bupati Balangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang disajikan melalui tabel 2.2 analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai komponen Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (bobot nilai)	 	 	9,00	9,20	9,40	9,60	10,48	10,58	10,58	10,58	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah			85%	88%	90%	90%	82,65%	82,92%	90%	92%	
4	Indeks Reformasi Birokrasi			91,70%	91,75%	91,80%	91,85%	91,75%	91,75%	91,80%	91,85%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur pendukung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan cakupan tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah. Keberadaan Sekretariat Daerah dalam jajaran unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Balangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

1. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah.

Sejauh ini kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah. Sekretariat Daerah memiliki peran yang penting dalam proses sinergitas program dan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Balangan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ini terlihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang menuju pada tercapainya tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah berperan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan daerah sendiri melakukan penilaian terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK). Yang mana indikator ini tersebar pada seluruh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk dilaksanakan oleh SKPD tersebut dan disampaikan setiap tahun

dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD dan kemudian dikompilasi menjadi LPPD Kabupaten Balangan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. LPPD ini juga menjadi dasar dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Balangan terhadap pelaksanaan anggaran setelah tahun anggaran berakhir. LPPD tersebut akan dinilai oleh tim daerah dan tim Nasional. Hasil dari penilaian ini disampaikan dalam bentuk nilai EKPPD yang mana penilaian ini menjadi *gengsi* Kepala Daerah di seluruh wilayah Indonesia sebagai hasil prestasi pelaksanaan program kegiatan untuk peningkatan pembangunan daerah.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Nilai EKPPD Kabupaten Balangan Tahun 2020 hingga tanggal 17 Juli 2022 belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi LPPD Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dan Validasi Terhadap Hasil EPPD Tim Daerah Atas LPPD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Se Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 2 September 2020 Nilai EKPPD Kabupaten Balangan tahun 2019 adalah 3,5620. Sedangkan nilai EKPPD tahun 2016 adalah 3,1393, tahun 2017 adalah 3,0671, tahun 2018 adalah 3,2946. Nilai EKPPD tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan oleh komitmen Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Bagian Pemerintahan untuk melakukan verifikasi data IKK yang dikumpul oleh SKPD tepat waktu dan tepat regulasi. Pola pengumpulan data dan pengecekan kebenaran data dukung telah dilakukan oleh Bagian Pemerintahan sesuai dengan SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan EKPPD mencerminkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk peningkatan pengembangan pembangunan daerah Kabupaten Balangan diukur dengan indikator-indikator utama pada setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Bagian di Sekretariat Daerah yang memiliki tugas pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta harmonisasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKIP) lingkup Kabupaten Balangan. Bagian Organisasi memiliki tugas melakukan harmonisasi LKIP SKPD sebagai bahan penyusunan LKIP Kabupaten. Hasil penilaian LKIP SKPD menjadi tolak ukur pencapaian Visi Misi SKPD tersebut. Sedangkan LKIP Kabupaten menjadi tolak ukur pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yang mana kedua penilaian ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi satu sama lain.

Hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaporan kinerja Kabupaten Balangan oleh Tim Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Balangan memperoleh nilai 65,45 atau predikat "B" Dibandingkan dengan capaian tahun lalu terdapat peningkatan sebesar 4,29%. Yaitu dari nilai LKIP sebesar 62,64 dengan predikat "B" meningkat menjadi 65,45 dengan predikat "B".

Nilai LKIP sebesar 62,64 dengan predikat "B" yang didapatkan Kabupaten Balangan di tahun lalu yang menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil (*outcome*) pada Pemerintah Kabupaten Balangan Hal

tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Balangan untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun - tahun mendatang;

- 3) Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi adalah dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan. Perolehan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2019 sebesar 48.09 yang merupakan angka realisasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan melalui aplikasi PMPRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia IRB Kabupaten Balangan adalah 51,84 atau kategori CC dengan rincian total komponen pengungkit (A) 20,35 dan total komponen hasil (B) 31,49.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang mulai didengungkan memerlukan perhatian lebih dari semua pihak di Sekretariat Daerah sebagai *leading sector* dan seluruh Pemerintah Kabupaten Balangan. Sejak Tahun 2018 pelaksanaan tahapan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Balangan sudah dilaksanakan, dan ini merupakan tantangan tersendiri terhadap Sekretariat Daerah agar dapat benar-benar mempersiapkan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Balangan melalui Bagian Organisasi Sekretariat. SKPD yang termasuk dalam area perubahan dan tim telah dapat menyusun Dokumen Road Map RB yang meliputi delapan area diantaranya Penataan Kelembagaan, Penataan SDM, Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Pelayanan Publik tetapi penguatan dalam area perubahan masih ada hal hal yang perlu diperbaiki.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi didasarkan dari penilaian komponen pengungkit terdiri atas 8 subansi atau 8

area perubahan, sedangkan komponen hasil terdiri dari 3 substansi. Adapun penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Komponen Penilaian (Pengungkit 60%)	Nilai Maksimal	Hasil PMRRB Inspektorat Kab. Balangan 2020	
			Nilai	%
1.	Manajemen Perubahan	5	1,12	22,40
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,09	41,80
3.	Penataan dan Pengutan Organisasi	6	4,50	75,00
4.	Penataan Tatalaksana	5	1,72	34,40
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	3,62	24,13
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	2,00	33,33
7.	Penguatan Pengawasan	12	4,37	36,41
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	1,30	21,67
	Jumlah	60	20,72	34,53

No.	Komponen Penilaian (Hasil 40%)	Nilai Maksimal	Hasil PMRRB Inspektorat Kab. Balangan 2020	
			Nilai	%
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	12,37	61,85
2.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10	10	100,00
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10	5,00	50,00
	Jumlah	40	27,37	68,43

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Hasil PMRRB Inspektorat Kab. Balangan 2020	
			Nilai	%
1.	Pengungkit	60	20,72	34,53
2.	Hasil	40	27,37	68,43
	Jumlah	100	48,09	48,09

- 4) Sebagai SKPD yang memberikan pelayanan koordinasi kepada seluruh SKPD di Kabupaten Balangan Sekretariat Daerah melalui 9 (Sembilan) Bagian yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang khas melaksanakan tugas secara maksimal memberikan pendampingan dan pembinaan terkait pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sesuai garis koordinasinya masing-masing. Seperti SKPD lain yang juga memberikan pelayanan Sekretariat Daerah juga melaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Sekretariat Daerah tidak hanya sebagai koordinasi pelayanan kepada SKPD terkait pelayanan

Administratif namun juga pelayanan kepada masyarakat umum dalam hal pelayanan sosial seperti Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, Bagian Perekonomian dan Bagian Humas.

Penilaian peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah diambil dari rata-rata hasil penilaian pelayanan 9 (Sembilan) Bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Capaian pada tahun lalu adalah sebesar 87,37% dari target yang ingin dicapai sebesar 88% dengan capaian indikator adalah 99,28%. Target yang ingin dicapai s.d tahun 2024 adalah IKM terhadap pelayanan Sekretariat daerah sebesar 90%. Sampai dengan tahun 2024 capaian kinerja Renstra (s.d tahun 2024) sudah mencapai 94,97%. Nilai ini didapat dari hasil koesonir yang dibagikan kepada masyarakat penerima pelayanan pada sekretariat daerah dengan menggunakan unsur pelayanan yang berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No.14 Tahun 2017. Diharapkan tahun 2024 target capaian IKM pelayanan Sekretariat Daerah sudah dapat mencapai target yang diharapkan. Sekretariat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik optimis bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan karena Kabupaten Balangan siap unyuk melakukan Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.

2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD

Pengertian masalah/ hambatan adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan, dengan kata lain merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Permasalahan/ hambatan yang terdapat di Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tidak meratanya sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengidentifikasi dan memahami permasalahan pemerintahan yang berkembang;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- c. Berubahnya peraturan/ regulasi dan dasar kebijakan yang mengatur tertib administrasi;
- d. Keuangan dengan keterbatasan anggaran dan biaya pendukung tugas dan fungsi;

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak lepas dari peran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terutama SKPD pengampu Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut. Sekretariat Daerah sendiri menjadi pengampu Misi 4 Kepala Daerah yakni

" Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara"

Adapun sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Misi ke-4 Kepala Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya nilai EKPPD;
- 3) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik.

Ketiga sasaran ini dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dari setiap Bagian pada Sekretariat Daerah. Adapun pengampu dari 3 sasaran ini adalah Bagian Pemerintahan, Bagian Umum dan Bagian Organisasi. Dari seluruh pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran ini semuanya menyajikan capaian 100%. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penataan Organisasi;
- 2) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;

3) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan prioritas dapat dilihat pada tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat

Pengertian peluang dapat diartikan sebagai kesempatan, kemungkinan untuk menang (mencapai tujuan) untuk mendapatkan keuntungan, atau juga dapat diartikan dengan kesempatan, waktu yang luang. Sedangkan pengertian dari tantangan yaitu perlawanan sesuatu yang berat, yang banyak dikerjakan untuk sesuatu yang menarik, yang menimbulkan semangat/ motivasi untuk melakukan/ mencapai tujuan. Tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu dari dalam (*internal*) dan luar (*eksternal*) organisasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tersedia dan tersebar nya sumber daya manusia/ aparatur dari berbagai macam disiplin ilmu;
- b. Anggaran pendukung pencapaian tugas dan fungsi Sekretariat;
- c. Predikat penyelenggaraan pemerintahan dengan predikat WTP
- d. Kondisi masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Balangan;
- e. Perkembangan informasi dan teknologi yang makin pesat dalam mendukung pengelolaan data dan informasi.

5. Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Formulasi isu-isu penting dalam hal ini berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024. Berbagai isu strategis yang berkembang dan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja sekretariat daerah antara lain:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* dan otonomi daerah yang bertanggungjawab;
- b. Tingginya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas;
- c. Pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan efisiensi dan efektifitas kinerja serta peningkatan pendapatan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Balangan yaitu dalam pencapaian misi meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Balangan.

Rancangan awal RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2022-2026 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2022-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Sekretariat Daerah sampai tahun 2024 terkait dengan program prioritas/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Adapun Hasil analisis kebutuhan terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi Renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Balangan	100%	Rp 70.226.602.459	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Balangan	100%	Rp 70.226.602.459
	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	Balangan	100%	Rp 1.520.496.500	Kegiatan : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	Balangan	100%	Rp 1.520.496.500
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	2 Dokumen	Rp 1.437.061.500	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	2 Dokumen	Rp 1.437.061.500

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	1 Laporan	Rp 83.435.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	1 Laporan	Rp 83.435.000
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	Balangan	100%	Rp 17.891.465.447	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	Balangan	100%	Rp 17.891.465.447
Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	Balangan	92 Orang/Bulan	Rp 17.543.965.747	Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	Balangan	92 Orang/Bulan	Rp 17.543.965.747
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balangan	1 Dokumen	Rp 153.465.100	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balangan	1 Dokumen	Rp 153.465.100
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	1 Laporan	Rp 82.279.800	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	1 Laporan	Rp 82.279.800

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Balangan	4 Laporan	Rp 111.754.800	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Balangan	4 Laporan	Rp 111.754.800
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Balangan	100%	Rp 439.670.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Balangan	100%	Rp 439.670.000
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Balangan	1 Paket	Rp 439.670.000	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Balangan	1 Paket	Rp 439.670.000
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	Balangan	100%	Rp 16.114.955.900	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	Balangan	100%	Rp 16.114.955.900
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balangan	2 Paket	Rp 712.383.600	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balangan	2 Paket	Rp 712.383.600
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 3.916.598.800	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 3.916.598.800
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.967.927.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.967.927.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.086.944.300	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.086.944.300
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.503.046.200	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.503.046.200
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	467 Laporan	Rp 6.928.056.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	467 Laporan	Rp 6.928.056.000
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Balangan	12 Bulan	Rp 9.306.806.300	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Balangan	12 Bulan	Rp 9.306.806.300
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 3.571.999.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 3.571.999.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 2.281.090.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 2.281.090.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 3.453.717.300	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 3.453.717.300

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Balangan	12 Bulan	Rp 15.432.523.100	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Balangan	12 Bulan	Rp 15.432.523.100
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balangan	50 Unit	Rp 4.147.311.800	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balangan	50 Unit	Rp 4.147.311.800
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balangan	1 Unit	Rp 1.096.666.600	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balangan	1 Unit	Rp 1.096.666.600
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balangan	1 Unit	Rp 5.358.265.800	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balangan	1 Unit	Rp 5.358.265.800
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balangan	1 Unit	Rp 2.651.902.900	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balangan	1 Unit	Rp 2.651.902.900
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balangan	1 Unit	Rp 2.178.376.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balangan	1 Unit	Rp 2.178.376.000

Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	Balangan	100%	Rp 3.962.463.512	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	Balangan	100%	Rp 3.962.463.512
Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	2 Orang/Bulan	Rp 2.542.463.512	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	2 Orang/Bulan	Rp 2.542.463.512
Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.020.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.020.000.000
Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	2 Orang	Rp 400.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	2 Orang	Rp 400.000.000
Kegiatan : Penataan Organisasi	Indeks Komposit Kelembagaan	Balangan	P-4	Rp 2.188.247.000	Kegiatan : Penataan Organisasi	Indeks Komposit Kelembagaan	Balangan	P-4	Rp 2.188.247.000
	Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Lengkap		100%			Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Lengkap		100%	
	Nilai Rata-rata IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Non UPP yang Bernilai Baik		84			Nilai Rata-rata IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Non UPP yang Bernilai Baik		84	

	Persentase SKPD yang Memiliki Dokumen Ketatalaksanaan Baik		100%			Persentase SKPD yang Memiliki Dokumen Ketatalaksanaan Baik		100%	
	Nilai Laporan Kinerja Pemda		14,26			Nilai Laporan Kinerja Pemda		14,26	
	Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai Sakip BB		75,76% (25 SKPD)			Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai Sakip BB		75,76% (25 SKPD)	
	Nilai IPP SKPD Sampel		Prima (A)			Nilai IPP SKPD Sampel		Prima (A)	
	Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja Baik		36,36% (12 SKPD)			Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja Baik		36,36% (12 SKPD)	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Balangan	65 Dokumen	Rp 575.212.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Balangan	65 Dokumen	Rp 575.212.000
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Balangan	4 Laporan	Rp 411.240.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Balangan	4 Laporan	Rp 411.240.000
Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Balangan	4 Dokumen	Rp 1.201.795.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Balangan	4 Dokumen	Rp 1.201.795.000
Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokol Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 3.369.974.700	Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokol Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 3.369.974.700
Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Balangan	1 Laporan	Rp 1.195.187.300	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Balangan	1 Laporan	Rp 1.195.187.300
Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Balangan	1 Laporan	Rp 1.194.419.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Balangan	1 Laporan	Rp 1.194.419.000

Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Balangan	5 Laporan	Rp 980.368.400	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Balangan	5 Laporan	Rp 980.368.400
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/ditera pkan oleh SKPD (%)	Balangan	100%	#####	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diter apkan oleh SKPD (%)	Balangan	100%	Rp113.277.199.300
	Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)		100%			Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)		100%	
Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD	Balangan	100%	Rp 1.637.530.100	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD	Balangan	100%	Rp 1.637.530.100
Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Balangan	4 Dokumen	Rp 1.094.210.600	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Balangan	4 Dokumen	Rp 1.094.210.600
Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Balangan	2 Dokumen	Rp 332.567.500	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Balangan	2 Dokumen	Rp 332.567.500
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Balangan	3 Dokumen	Rp 210.752.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Balangan	3 Dokumen	Rp 210.752.000
Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana	Balangan	100%	#####	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp110.018.247.200

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Balangan	5 Dokumen	Rp 20.625.744.200	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Balangan	5 Dokumen	Rp 20.625.744.200
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Balangan	3 Dokumen	Rp 82.156.892.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Balangan	3 Dokumen	Rp 82.156.892.000
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Balangan	2 Dokumen	Rp 7.235.611.000	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Balangan	2 Dokumen	Rp 7.235.611.000

Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Kualiatas Kebijakan	Balangan	55	Rp 1.172.107.400	Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Kualiatas Kebijakan	Balangan	55	Rp 1.172.107.400
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Balangan	500 Dokumen	Rp 656.827.900	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Balangan	500 Dokumen	Rp 656.827.900
Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Balangan	10 Kasus	Rp 341.727.500	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Balangan	10 Kasus	Rp 341.727.500
Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Balangan	500 Dokumen	Rp 173.552.000	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Balangan	500 Dokumen	Rp 173.552.000
Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang difasilitasi	Balangan	10 Dokumen	Rp 449.314.600	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang difasilitasi	Balangan	10 Dokumen	Rp 449.314.600
Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Balangan	10 Dokumen	Rp 449.314.600	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Balangan	10 Dokumen	Rp 449.314.600
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	Balangan	100%	Rp 4.398.688.400	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	Balangan	100%	Rp 4.398.688.400
	Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi		100%			Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi		100%	

Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 1.302.638.200	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 1.302.638.200
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Balangan	4 Dokumen	Rp 218.680.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Balangan	4 Dokumen	Rp 218.680.000
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Balangan	4 Laporan	Rp 539.239.500	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Balangan	4 Laporan	Rp 539.239.500
Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Balangan	1 Dokumen	Rp 438.397.700	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Balangan	1 Dokumen	Rp 438.397.700
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Balangan	1 Dokumen	Rp 106.321.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Balangan	1 Dokumen	Rp 106.321.000

Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan Persentase Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 1.002.809.200	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan Persentase Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 1.002.809.200
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Balangan	4 Dokumen	Rp 307.985.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Balangan	4 Dokumen	Rp 307.985.000
Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Balangan	1 Laporan	Rp 308.363.200	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Balangan	1 Laporan	Rp 308.363.200
Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Balangan	4 Laporan	Rp 386.461.000	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Balangan	4 Laporan	Rp 386.461.000
Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola PBJ	Balangan	50	Rp 1.889.037.000	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola PBJ	Balangan	50	Rp 1.889.037.000
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	1 Dokumen	Rp 421.474.700	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	1 Dokumen	Rp 421.474.700

Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Balangan	1 Dokumen	Rp 1.016.817.400	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Balangan	1 Dokumen	Rp 1.016.817.400
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	5 Orang	Rp 450.744.900	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	5 Orang	Rp 450.744.900
Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 204.204.000	Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 204.204.000
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Balangan	1 Dokumen	Rp 40.123.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Balangan	1 Dokumen	Rp 40.123.000

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	Balangan	1 Dokumen	Rp 102.452.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	Balangan	1 Dokumen	Rp 102.452.000
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Balangan	1 Dokumen	Rp 61.629.000	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Balangan	1 Dokumen	Rp 61.629.000

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Tingkat Kabupaten yang melibatkan unit kerja dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menghasilkan usulan kebutuhan kegiatan. Hasil itu selanjutnya dibahas lagi dalam Musrenbang dengan stakeholder untuk mengevaluasi apakah usulan tersebut memang merupakan kegiatan yang benar-benar diperlukan di masyarakat. Stakeholder yang terlibat antara lain LSM, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi profesi, kelompok/ forum informasi masyarakat, dan sebagainya. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 sudah mengacu kepada Kemendagri 050 Tahun 2021 yang telah menjabarkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan SKPD pengampu dari program kegiatan yang di maksud, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.

Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah tahun 2024. Tahun 2024 Sekretariat Daerah akan melaksanakan 3 (tiga) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan dengan pagu belanja operasi sebesar **Rp. 241.173.544.111,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Tjup Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Sebelas Rupiah)**. Termasuk di dalamnya adalah belanja untuk pemenuhan gaji dan tunjangan baik untuk pegawai Sekretariat Daerah dan untuk Bupati dan Wakil Bupati serta belanja bantuan keuangan hibah untuk organisasi keagamaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Balangan di tahun 2024.

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Balangan	100%	Rp 110.993.120.011	APBD	100%	Rp 65.363.803.873
4	01	01	2,01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	Balangan	100%	Rp 1.520.496.500	APBD	100%	Rp 2.021.000.000
4	01	01	2,01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	2 Dokumen	Rp 1.437.061.500	APBD	2 Dokumen	Rp 1.937.565.000
4	01	01	2,01	06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	1 Laporan	Rp 83.435.000	APBD	6 Laporan	Rp 83.435.000
4	01	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	Balangan	100%	Rp 17.891.465.447	APBD	100%	Rp 17.293.233.971

4	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Peyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	Balangan	92 Orang/Bulan	Rp 17.543.965.747	APBD	12 Bulan	Rp 16.946.428.971
4	01	01	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Balangan	1 Dokumen	Rp 153.465.100	APBD	1 Dokumen	Rp 163.983.000
4	01	01	2.02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balangan	1 Laporan	Rp 82.279.800	APBD	1 Laporan	Rp 92.430.000
4	01	01	2.02	07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Balangan	4 Laporan	Rp 111.754.800	APBD	12 Laporan	Rp 90.382.000
4	01	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	Balangan	100%	Rp 439.670.000	APBD	100%	Rp 321.725.000
4	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Balangan	1 Paket	Rp 439.670.000	APBD	1 Paket	Rp 321.725.000
4	01	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum (%)	Balangan	100%	Rp 31.218.841.300	APBD	100%	Rp 16.242.265.890
4	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Balangan	2 Paket	Rp 1.238.543.600	APBD	2 Paket	Rp 752.888.000

4	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 8.647.318.000	APBD	1 Paket	Rp 3.916.617.190
4	01	01	2.06	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 11.100.378.500	APBD	1 Paket	Rp 1.967.933.000
4	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.801.499.000	APBD	1 Paket	Rp 1.086.945.000
4	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.503.046.200	APBD	1 Paket	Rp 1.529.080.200
4	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balangan	467 Laporan	Rp 6.928.056.000	APBD	467 Laporan	Rp 6.988.802.500
4	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Balangan	12 Bulan	Rp 12.706.606.300	APBD	12 Bulan	Rp 9.800.000.000
4	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 6.656.999.000	APBD	12 Laporan	Rp 4.000.000.000
4	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 2.595.890.000	APBD	12 Laporan	Rp 2.300.000.000
4	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Balangan	1 Laporan	Rp 3.453.717.300	APBD	12 Laporan	Rp 3.500.000.000

4	01	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)	Balangan	12 Bulan	Rp 35.326.619.252	APBD	12 Bulan	Rp 15.649.770.500
4	01	01	2.09	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Balangan	50 Unit	Rp 12.888.464.800	APBD	50 Unit	Rp 2.618.384.000
4	01	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Balangan	1 Unit	Rp 1.097.138.600	APBD	20 Unit	Rp 1.209.500.000
4	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balangan	1 Unit	Rp 16.002.077.000	APBD	3 Unit	Rp 7.613.200.000
4	01	01	2.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balangan	1 Unit	Rp 3.160.562.852	APBD	3 Unit	Rp 2.030.310.500
4	01	01	2.09	11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Balangan	1 Unit	Rp 2.178.376.000	APBD	3 Unit	Rp 2.178.376.000
4	01	01	2,11		Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	Balangan	100%	Rp 3.962.463.512	APBD	100%	Rp 2.944.503.512

4	01	01	2,11	01	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	2 Orang/Bulan	Rp 2.542.463.512	APBD	12 Bulan	Rp 2.544.503.512
4	01	01	2,11	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Balangan	1 Paket	Rp 1.020.000.000	APBD	1 Paket	Rp -
4	01	01	2,11	04	Sub Kegiatan : Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Balangan	2 Orang	Rp 400.000.000	APBD	2 Orang	Rp 400.000.000
4	01	01	2,13		Kegiatan : Penataan Organisasi	Indeks Komposit Kelembagaan	Balangan	P-4	Rp 2.188.247.000	APBD	P-4	Rp 2.988.247.000
				Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Langkap		100%		100%				
				Nilai Rata-rata IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Non UPP yang Bernilai Baik		84		84				
				Persentase SKPD yang Memiliki Dokumen Ketatalaksanaan Baik		100%		100%				
				Nilai Laporan Kinerja Pemda		14,26		14,26				
				Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai Sakip BB		75,76% (25 SKPD)		75,76% (25 SKPD)				
				Nilai IPP SKPD Sampel		Prima (A)		Prima (A)				
				Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja Baik		36,36% (12 SKPD)		36,36% (12 SKPD)				
4	01	01	2,13	01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Balangan	65 Dokumen	Rp 575.212.000	APBD	65 Dokumen	Rp 575.212.000

4	01	01	2,13	02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Balangan	4 Laporan	Rp 411.240.000	APBD	4 Laporan	Rp 411.240.000
4	01	01	2,13	03	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Balangan	4 Dokumen	Rp 1.201.795.000	APBD	4 Dokumen	Rp 2.001.795.000
4	01	01	2,14		Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokol Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 5.738.710.700	APBD	100%	Rp 2.103.058.000
4	01	01	2,14	01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Balangan	1 Laporan	Rp 2.485.194.300	APBD	1 Laporan	Rp 1.026.087.000
4	01	01	2,14	02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Balangan	1 Laporan	Rp 1.550.070.000	APBD	1 Laporan	Rp 456.125.000
4	01	01	2,14	03	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Balangan	5 Laporan	Rp 1.703.446.400	APBD	5 Laporan	Rp 620.846.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	Balangan	100%	Rp 125.556.079.700	APBD	100%	Rp 84.373.888.721
						Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)		100%			100%	
4	01	02	2,01		Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD	Balangan	100%	Rp 1.712.530.500	APBD	100%	Rp 1.281.377.900
4	01	02	2,01	01	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Balangan	4 Dokumen	Rp 1.169.211.000	APBD	4 Dokumen	Rp 646.938.200
4	01	02	2,01	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Balangan	2 Dokumen	Rp 332.567.500	APBD	2 Dokumen	Rp 425.847.700

4	01	02	2,01	03	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Balangan	3 Dokumen	Rp 210.752.000	APBD	3 Dokumen	Rp 208.592.000
4	01	02	2.02		Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp 121.542.127.200	APBD	100%	Rp 81.275.175.821
4	01	02	2,02	01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Balangan	5 Dokumen	Rp 20.625.744.200	APBD	5 Dokumen	Rp 1.902.307.821
4	01	02	2,02	02	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Balangan	3 Dokumen	Rp 93.680.772.000	APBD	3 Dokumen	Rp 73.711.627.000
4	01	02	2,02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Balangan	2 Dokumen	Rp 7.235.611.000	APBD	2 Dokumen	Rp 5.661.241.000
4	01	02	2.03		Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Kualiatas Kebijakan	Balangan	55	Rp 1.852.107.400	APBD	55	Rp 1.273.180.000
4	01	02	2.03	01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Balangan	500 Dokumen	Rp 656.827.900	APBD	500 Dokumen	Rp 656.828.000
4	01	02	2.03	02	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Balangan	10 Kasus	Rp 1.021.727.500	APBD	10 Kasus	Rp 442.800.000

4	01	02	2.03	03	Sub Kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Balangan	500 Dokumen	Rp	173.552.000	APBD	500 Dokumen	Rp 173.552.000
4	01	02	2.04		Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang difasilitasi	Balangan	10 Dokumen	Rp	449.314.600	APBD	10 Dokumen	Rp 544.155.000
4	01	02	2,04	01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Balangan	10 Dokumen	Rp	449.314.600	APBD	10 Dokumen	Rp 544.155.000
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD	Balangan	100%	Rp	4.624.344.400	APBD	100%	Rp 4.636.609.000
				Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi		100%		100%					
4	01	03	2.01		Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp	1.352.338.200	APBD	100%	Rp 1.268.574.500
4	01	03	2,01	01	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Balangan	4 Dokumen	Rp	230.910.000	APBD	4 Dokumen	Rp 218.680.000
4	01	03	2,01	02	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Balangan	4 Laporan	Rp	560.559.500	APBD	4 Laporan	Rp 539.239.500
4	01	03	2,01	03	Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Balangan	1 Dokumen	Rp	444.887.700	APBD	1 Dokumen	Rp 404.334.000

4	01	03	2,01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Balangan	1 Dokumen	Rp	115.981.000	APBD	1 Dokumen	Rp 106.321.000
4	01	03	2.02		Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan Persentase Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp	1.128.409.200	APBD	100%	Rp 1.325.276.500
4	01	03	2,02	01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Balangan	4 Dokumen	Rp	307.985.000	APBD	4 Dokumen	Rp 460.198.000
4	01	03	2,02	02	Sub Kegiatan : Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Balangan	1 Laporan	Rp	433.963.200	APBD	1 Laporan	Rp 403.095.700
4	01	03	2,02	03	Sub Kegiatan : Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Balangan	4 Laporan	Rp	386.461.000	APBD	4 Laporan	Rp 461.982.800
4	01	03	2.03		Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola PBJ	Balangan	50	Rp	1.889.037.000	APBD	50	Rp 1.890.135.000
4	01	03	2.03	01	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	1 Dokumen	Rp	421.474.700	APBD	1 Dokumen	Rp 421.475.000
4	01	03	2.03	02	Sub Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Balangan	1 Dokumen	Rp	1.016.817.400	APBD	1 Dokumen	Rp 1.017.915.000

4	01	03	2.03	03	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Balangan	5 Orang	Rp	450.744.900	APBD	6 Orang	Rp 450.745.000
4	01	03	2.04		Kegiatan : Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	Balangan	100%	Rp	254.560.000	APBD	100%	Rp 152.623.000
4	01	03	2.04	01	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Balangan	1 Dokumen	Rp	56.636.000	APBD	1 Dokumen	Rp 40.123.000
4	01	03	2.04	02	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada SKPD terkait (rekomendasi)	Balangan	1 Dokumen	Rp	123.915.000	APBD	1 Dokumen	Rp 112.500.000
4	01	03	2.04	03	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Balangan	1 Dokumen	Rp	74.009.000	APBD	1 Dokumen	Rp -

Parangin Selamber 2023
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. Sutikno, AP., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19760417 199412 1 001

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Sekretariat Daerah pada tahun 2024, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yang mana hal tersebut merupakan hal yang dapat menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Seluruh pihak khususnya jajaran ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan perlu mencermati berbagai rambu dan *guidance* di dalam melaksanakan tugas serta mengemban tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas harus fokus pada upaya mencapai tujuan dan sasaran, serta berusaha mewujudkan visi organisasi.

Akhir kata, semoga penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Demikian Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program/ kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Paringin, September 2023

SEKRETARIS DAERAH,



H. Sutikno, Ap., M.AP

Pembina Utama Madya (IV/D)

NIP. 19760417 199412 1 001